

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Keuangan

1. Pengertian Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan dana dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa sumber memberikan definisi tentang pengelolaan keuangan, salah satunya menurut Kasmir yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aset untuk mencapai tujuan yang komprehensif.¹ Menurut Fahmi dalam Diyah Santi H, pengelolaan keuangan adalah perpaduan antara ilmu dan seni yang mempelajari peran manajer keuangan dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan dana, dengan tujuan meraih keuntungan, memberikan hasil bagi pemegang saham, serta memastikan kelangsungan operasional perusahaan.²

Arwildayanto mengatakan, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan terdiri dari empat aspek kegiatan yakni penyusunan atau perencanaan anggaran (*budgeting*), pembukuan (*accounting*), pemeriksaan, dan pertanggung jawaban.³ Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa

¹ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), 5.

² Diyah Santi Hariyani, "Manajemen Keuangan 1" (Madiun: UNIPMA Prees, 2021), 2.

³ Arwildayanto, Nina Lamatenggo, and Warni Tune Sumar, *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Widya Padjadjaran Anggota, 2017), 24.

pengelolaan keuangan adalah segala kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh manajer keuangan yang meliputi perencanaan, pengalokasian, pengendalian, dan pemeriksaan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga.

2. Pengertian Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Pengelolaan keuangan adalah bagian penting dari manajemen sekolah yang berperan dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah. Sama seperti dalam manajemen pendidikan pada umumnya, pengelolaan keuangan dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.⁴

Menurut Depdiknas, pengelolaan keuangan adalah suatu proses yang mencakup pengurusan keuangan melalui pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pengeluaran, pengawasan, hingga pertanggungjawaban keuangan.⁵ Abdullah dalam Arwildayanto menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dan pembiayaan pendidikan adalah kegiatan yang mengatur sumber daya keuangan pendidikan, mengalokasikannya, dan memanfaatkan dana

⁴ Rawati and Arafah, *Manajemen Keuangan Dalam Pendidikan Sekolah* (Makasar: Pustaka Taman Ilmu, 2019), 8.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Keuangan Materi Pelatihan Terpadu Untuk Kepala Sekolah* (Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2002).

pendidikan secara optimal untuk mencapai maksimalisasi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas tinggi.⁶

Dalam istilah lain, pengelolaan keuangan pendidikan juga dikenal sebagai pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan diartikan sebagai total dana yang diperoleh dan digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti pembayaran gaji guru, pengembangan profesionalisme guru, penyediaan sarana ruang belajar, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.⁷

3. Tujuan dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Tujuan dari pengelolaan keuangan pendidikan adalah untuk mencari dan memperoleh sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah, memastikan penggunaan dana yang efektif dan sesuai dengan peraturan, serta menyusun laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pengelolaan ini, diharapkan kebutuhan dana sekolah dapat direncanakan dengan tepat, diusahakan sumber dananya, dicatat secara transparan, dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan program sekolah secara efisien dan efektif, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Menurut Kadarman dalam Syaifullah, tujuan manajemen keuangan adalah :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi penggunaan keuangan sekolah.

⁶ Arwildayanto, Lamatenggo, and Sumar, *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*, 7.

⁷ Nanang Fatah, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya, 2000), 112.

- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
- c. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga pendidikan perlu memiliki kreativitas dan inovasi dalam memperoleh sumber daya, memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan, serta menyelenggarakan pembukuan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸

Menurut Thomas H. Jones, sebagaimana yang dikutip oleh Arwidayanto dkk bahwa fungsi pengelolaan keuangan pendidikan di bagi menjadi tiga fase yaitu:

- a. Perencanaan anggaran (*budgeting*), yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa terjadi efek samping yang merugikan.
- b. Pelaksanaan, yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan.
- c. Evaluasi atau *auditing* merupakan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran.⁹

Sumber daya keuangan yang sehat merupakan kunci keberlanjutan lembaga agar dapat bertahan dan terus berkembang. Menurut Asri Jaya dan Sony Kuswandi fungsi-fungsi pengelolaan pembiayaan adalah :

⁸ Syaifullah, "Manajemen Keuangan Pendidikan," *Jurnal of Pedegogy* 4 (2021): 11–17.

⁹ Arwidayanto, Lamatenggo, and Sumar, *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*, 7.

a. Perencanaan Pembiayaan dan Anggaran (*Budgeting*)

Perencanaan merupakan fungsi kunci dalam manajemen yang memungkinkan perusahaan untuk meramalkan kondisi masa depan dan memprediksi keuntungan serta kerugian berdasarkan kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang. Di sisi lain, penganggaran, sebagai bagian dari pengelolaan pembiayaan, berkaitan dengan alokasi dana yang efisien untuk berbagai kebutuhan perusahaan, seperti gaji karyawan, biaya operasional gedung, dan kebutuhan lainnya, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Pengendalian (*Controlling*)

Fungsi pengendalian adalah tahap berikutnya dalam pengelolaan pembiayaan. Secara umum, setelah fungsi ini dijalankan, evaluasi akan dilakukan. Fungsi ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi masalah yang ada, serta hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan adanya fungsi ini, perusahaan dapat mendeteksi ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan yang perlu diperbaiki.

c. Pemeriksaan (*Auditing*)

Tujuan dilaksanakannya audit internal adalah untuk memastikan bahwa manajemen dan pengelolaan pembiayaan di perusahaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, tanpa adanya penyimpangan. Audit yang dilakukan

secara rutin juga dapat mengurangi risiko kerugian akibat kelalaian karyawan.

d. Pelaporan (*Reporting*)

Melalui pengelolaan pembiayaan, perusahaan dapat mengevaluasi kondisi keuangan yang dimilikinya. Fungsi manajemen keuangan ini mempermudah perusahaan dalam membuat keputusan bisnis ke depan, karena memungkinkan perusahaan untuk menganalisis kegiatan bisnis yang sedang dijalankan. Pelaporan keuangan biasanya dilakukan secara periodik, mulai dari triwulanan, semesteran, hingga tahunan.¹⁰

Dengan adanya aktivitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan diatas maka akan menjadi indikator bagi keberhasilan pada satuan pendidikan dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan pada lembaga pendidikan.

4. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pengelolaan keuangan pendidikan dilandaskan pada asas keadilan, efisiensi, transparansi, dan tanggungjawab publik. Berikut merupakan pedoman dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan pendidikan :

a. Transparansi

¹⁰ Asri Jaya et al., *Manajemen Keuangan, Modul Kuliah*, vol. 7 (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 5.

Transparansi dalam lembaga pendidikan menunjukkan bahwa administrasi keuangan lembaga tersebut bersifat terbuka, mencakup keterbukaan tentang sumber dan jumlah dana, rincian penggunaannya, serta akuntabilitas yang harus jelas agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dengan mudah. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah adalah contoh yang sudah tidak asing lagi bagi seluruh warga sekolah dan orang tua siswa.

b. Akuntabilitas

Penilaian terhadap seseorang oleh orang lain didasarkan pada sejauh mana kualitas pekerjaannya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan mengacu pada kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sekolah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Terdapat tiga kondisi mendasar yang digunakan untuk membangun akuntabilitas :

- 1) Para anggota penyelenggara lembaga pendidikan terbuka terhadap keuangan lembaga pendidikan.
- 2) Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan standar kerja pada setiap lembaga pendidikan.
- 3) Masyarakat turut berpartisipasi untuk melayani.

c. Efektifitas

Menurut Garner, mengukur efektivitas lebih kompleks karena tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan, tetapi juga menghasilkan hasil kualitatif yang sejalan dengan visi lembaga pendidikan. Efektivitas pengelolaan keuangan dapat diukur dari apakah semua kegiatan mendapatkan dana yang cukup dan apakah seluruh rencana kegiatan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang dikeluarkan. Fokus efisiensi terletak pada penggunaan jasa, waktu, biaya, dan pemikiran. Efisiensi dapat dipahami sebagai keseimbangan antara *input* dan *output*, yang berhubungan dengan kuantitas hasil dari suatu kegiatan.¹¹

5. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Menurut Sulton Masyhud ruang lingkup pengelolaan keuangan pendidikan adalah membuat rencana anggaran, melakukan pembukuan penggunaan keuangan sekolah, melakukan pemeriksaan keuangan sekolah, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah,¹² berikut penjelasannya :

a. Perencanaan dan Anggaran

¹¹ Haekal, M Muhsin, and Irfan Yusuf, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), 28–29.

¹² Sulthon Masyhud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jember: LPMK, 2014), 156–158.

Perencanaan adalah suatu proyeksi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan elemen penting dalam setiap kegiatan administrasi, karena tanpa adanya perencanaan, pelaksanaan kegiatan akan cenderung gagal dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan harus dilakukan pada tahap awal dan berlanjut sepanjang proses administrasi. Dalam pembiayaan pendidikan berbasis sekolah, perencanaan mencakup dua aktivitas utama, yaitu penyusunan anggaran yang sistematis dan pengembangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), kedua aktivitas tersebut dijabarkan sebagaimana berikut ini :

- 1) Sistematika penyusunan anggaran pendidikan

Anggaran adalah rencana operasional yang dinyatakan dalam bentuk angka atau uang, yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan instansi dalam periode waktu tertentu. Sistematika anggaran menggambarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pendidikan, sehingga memungkinkan untuk mengetahui alokasi biaya untuk setiap kegiatan tersebut. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, pengawasan, serta sebagai bantuan bagi manajemen untuk mengarahkan lembaga dalam melaksanakan berbagai kegiatan.

- 2) Pengembangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

Proses pengembangan RKAS biasanya melewati beberapa langkah, dimulai dengan pembentukan kelompok kerja di tingkat sekolah yang terdiri dari pembantu kepala sekolah. Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan biaya yang perlu dikeluarkan, kemudian mengelompokkan biaya tersebut sesuai dengan prioritas kebutuhan. Berdasarkan hasil analisis biaya, dilakukan seleksi terhadap alokasi yang sangat mendesak dan tidak dapat dikurangi, kecuali jika rencana tersebut tidak mengganggu kelancaran proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Setelah itu, penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan dana yang tersedia.¹³

b. Pelaksanaan Keuangan

Pelaksanaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun, dengan kemungkinan adanya penyesuaian jika diperlukan. Dalam manajemen keuangan, pelaksanaan terbagi menjadi dua proses utama, yaitu pengelolaan penerimaan dan pengeluaran. Sumber penerimaan keuangan sekolah berasal dari yayasan dan pemerintah, berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana pendidikan gratis. Pengelolaan dana BOS harus mengikuti pedoman teknis yang ditetapkan oleh

¹³ Undang Ruslan Wahyudin, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan” (Sleman: Cv Budi Utama, 2021), 33.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan program BOS. Pengelolaan penerimaan keuangan dilakukan oleh bendahara dengan sistem satu pintu, dan semua pengeluaran harus sesuai dengan program sekolah, di mana setiap program memiliki pihak yang bertanggung jawab.¹⁴

c. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa secara berkala setiap program yang ada di sekolah. Karyatu dalam penelitian Friska dkk mengungkapkan bahwa evaluasi keuangan dilakukan setiap triwulan atau persemester. Dana yang diterima harus dipertanggungjawabkan kepada sumber dana tersebut. Jika dana berasal dari orang tua siswa, maka laporan pertanggungjawabannya harus disampaikan kepada orang tua siswa. Sebaliknya, jika dana berasal dari pemerintah, maka laporan pertanggungjawabannya harus diberikan kepada pemerintah. Setiawati dalam penelitian Friska dkk menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan sekolah. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun dengan rapi dan mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.¹⁵

¹⁴ Cipto Handoko and Tukiran, "Manajemen Kepala Sekolah/Madrasah Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan," *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2022): 8.

¹⁵ Friska Ayu Nur Rabani, Syunu Trihantoyo, and Windasari, "Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Keuangan Sekolah Di SMP Implementation of Monitoring and Evaluation of School Finances in Junior High Schools in Increasing Transparency and Accountability," *JIMP (Jurnal Inovasi dan Manajemen Pendidikan)* 3, no. 1 (2023): 4.

B. Kualitas Pendidikan

1. Pengertian Kualitas Pendidikan

Kualitas merujuk pada sifat yang menggambarkan tingkat baiknya suatu barang atau jasa yang dihasilkan atau disediakan oleh suatu lembaga berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Sallis yang dikutip oleh Ridwan, konsep kualitas ini bersifat mutlak. Sebaliknya, konsep kualitas yang bersifat relatif adalah konsep yang tergantung pada kualitas mutlak tersebut.¹⁶

Nur Azman menjelaskan bahwa kualitas merupakan ukuran seberapa baik atau buruknya suatu hal. Kualitas juga dapat diartikan sebagai tingkat kecakapan, kepandaian, dan sebagainya. Secara umum, kualitas menggambarkan karakteristik keseluruhan dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Dalam pengertian ini, kualitas mencerminkan tingkat keunggulan suatu produk, baik itu barang atau jasa, yang dihasilkan melalui suatu upaya atau pekerjaan.¹⁷

Crosby mendefinisikan mutu kualitas adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai yang diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Kualitas bukan hanya tentang seberapa baik suatu produk atau jasa, tapi juga tentang seberapa sesuai produk atau jasa tersebut dengan standar

¹⁶ Ridwan Abdullah and Sani, *Penjamin Mutu Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 3.

¹⁷ Nur Azman, *Kamus Standar Bahasa Indonesia* (Bandung: Fokusmedia, 2013), 227.

yang telah ditentukan. Jika produk atau jasa memenuhi standar, maka produk atau jasa tersebut dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik.¹⁸

Dalam konteks pendidikan, kualitas merujuk pada hasil belajar yang mencakup prestasi siswa dalam proses belajar mengajar, baik yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, maupun perilaku setelah mempelajari pendidikan agama Islam dalam periode tertentu atau per semester. Prestasi ini biasanya dinyatakan dalam bentuk nilai rapor setiap semester. Dengan demikian, kualitas pendidikan dapat disimpulkan sebagai tingkat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien, yang bertujuan untuk menciptakan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik, yang dinyatakan lulus dari suatu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

2. Indikator Kualitas Pendidikan

Indikator kualitas pendidikan melibatkan berbagai aspek untuk mengevaluasi kualitas suatu sistem pendidikan. Beberapa indikator umum meliputi:

- a. Kualifikasi dan Kompetensi Guru: Memastikan guru memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk memberikan pembelajaran efektif.
- b. Hasil Belajar Siswa: Melibatkan pencapaian akademis siswa, baik melalui ujian standar, tes kemampuan, atau evaluasi lainnya.

¹⁸ M Syahputra Batubara and Zainal Arifin, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2022) 11.

- c. Rasio Siswa per Guru: Menilai sejauh mana beban kerja guru dapat mempengaruhi kualitas pengajaran dan pembelajaran.
- d. Fasilitas dan Infrastruktur Pendidikan: Menentukan ketersediaan fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan teknologi pendidikan.
- e. Kurikulum dan Metode Pembelajaran: Mengevaluasi relevansi kurikulum dengan tuntutan pasar kerja serta efektivitas metode pembelajaran.
- f. Partisipasi Siswa dan Tingkat Dropout: Menilai sejauh mana siswa terlibat dalam kegiatan pendidikan dan mencegah tingkat *dropout*.
- g. Ketersediaan Sumber Daya dan Anggaran: Menilai alokasi anggaran untuk pendidikan dan ketersediaan sumber daya yang mendukung proses pembelajaran.

Indikator-indikator ini memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas pendidikan dan membantu dalam meningkatkan efektivitas sistem pendidikan. Evaluasi berkelanjutan terhadap indikator-indikator ini dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.¹⁹

3. Standar Kualitas Pendidikan

Pelaksanaan sistem penjaminan kualitas pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama sistem penjaminan

¹⁹ Mokh. Fakhruddin Siswopranoto, "Standar Mutu Pendidikan," *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2022): 3–4.

kualitas pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas:

a. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Standar kompetensi lulusan (SKL) yang diharapkan sesuai kurikulum yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Beriman, berakhlak mulia, percaya diri dan bertanggung jawab.
- 2) Memiliki pengetahuan faktual, konseptual atau prosedural serta metakognitif tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban.
- 3) Memiliki kemampuan berfikir dan bertindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret

b. Standar Proses

Standar proses yang diharapkan berlaku sebagai berikut:

- 1) Mendorong peserta didik untuk mencari tahu sendiri.
- 2) Penguatan penggunaan pendekatan ilmiah.
- 3) Keseimbangan antara *softskill* dengan *hardskill*.
- 4) Mengutamakan pemberdayaan dan pembudayaan peserta didik,

- 5) Menerapkan nilai dengan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas.
- 6) Berbasis kompetensi dan aneka sumber belajar.
- 7) Menuju keterampilan aplikatif dan memanfaatkan IT.

c. Standar Isi

Standar isi dan proses sangat berkaitan dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh guru. Berikut adalah standar isi yaitu:

- 1) Kurikulum relevan dengan lingkungan dan kebutuhan.
- 2) Mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- 3) Rancangan mata pelajaran dan beban belajar memberi waktu yang leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, keterampilan dan pengetahuan.

d. Standar Penilaian

Untuk dapat mengukur kompetensi peserta didik, guru harus menetapkan penilaian autentik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perencanaan penilaian berdasarkan prinsip-prinsip penilaian seperti sahih, objektif, terbuka, ekonomis, sistematis, akuntabel dan edukatif.
- 2) Pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif dan efisien.

- 3) Hasil penelitian dilaporkan secara objektif, akuntabel dan informatif.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Upaya pemenuhan kualitas sarana dan prasarana sangat tergantung pada bantuan pemerintah (pusat dan daerah), serta kemampuan satuan pendidikan dalam mengenali permasalahan dan prioritas kebutuhan pemenuhan sarpras. Berikut standar sarpras, yaitu:

- 1) Kapasitas dan daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan standar.
- 2) Jumlah dan kondisi sarpras pendidikan sesuai dengan standar. Seperti jenis, luas, kondisi, kelengkapan peralatan dan perabotan.

f. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Berdasarkan peraturan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 mengatur tentang Standar Kualifikasi Akademik, sebagai berikut:

- 1) Jumlah dan kualifikasi pendidik sesuai standar seperti minimal S1.
- 2) Kualifikasi kepala satuan pendidikan sesuai standar seperti, minimal waktu diangkat berusia 54 tahun, pengalaman kerja minimal 5 tahun.
- 3) Ketersediaan kepala tenaga administrasi seperti minimal lulusan SMK dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun.

g. Standar Pengelolaan

Acuan yang digunakan dalam standar pengelolaan adalah Permendiknas No 19 tahun 2007, yaitu seperti berikut:

- 1) Perencanaan program dilaksanakan sesuai dengan standar seperti rencana kerja disusun berdasarkan pemetaan kondisi satuan pendidikan dan melibatkan pemangku kepentingan.
- 2) Pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan standar seperti, kelengkapan pedoman pengelolaan, pengembangan program peningkatan SDM dll.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program secara berkala.
- 4) Kepala satuan pendidikan berkinerja dengan baik, seperti berkepribadian sosial tinggi dan kepemimpinan yang baik.
- 5) Satuan pendidikan mengelola sistem informasi.

h. Standar Pembiayaan

Acuan yang digunakan dalam standar Pembiayaan adalah Permendiknas No. 69 tahun 2009 tentang standar biaya, yaitu seperti berikut:

- 1) Satuan pendidikan tidak memungut biaya dari peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi.
- 2) Biaya operasional non-personil minimal sesuai standar (total anggaran dikurangi biaya investasi dan gaji dibagi jumlah peserta didik).

- 3) Pengelolaan dana yang masuk ke satuan pendidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel.²⁰

4. Hubungan Kualitas Pendidikan dengan Pengelolaan Keuangan

Pegelolaan keuangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah perlu memperhatikan tiga komponen penentu keberhasilan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang membutuhkan perhatian pengalokasian dana antara lain :

a. Pengelolaan Keuangan Untuk Meningkatkan Kualitas Siswa

Dalam Pengelolaan keuangan di sekolah bendahara sekolah harus mengalokasikan dana untuk program-program pendidikan bagi siswa. Peningkatan kualitas pendidikan siswa merupakan sumber daya terpenting dalam proses pembelajaran dan juga kegiatan sekolah. Wahana yang paling tepat untuk melibatkan para siswa adalah kegiatan-kegiatan diluar kurikuler atau ekstrakurikuler. Dalam Pengelolaan keuangan di sekolah bendahara sekolah harus mengalokasikan dana untuk program-program pendidikan bagi siswa

b. Pengelolaan Keuangan Untuk Meningkatkan Kualitas Guru

Guru merupakan salah satu faktor yang mepengaruhi kualitas siswa. guru mempunyai peranan penting menjadi media dalam proses pembelajaran siswa. kualitas siswa tergantung bagaimana peran guru dalam memberikan pembelajaran yang tepat kepada

²⁰ Henry Alexi Rudolf Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 169.

siswanya. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik maka akan memberi kepuasan terhadap guru, dengan adanya rasa kepuasan maka akan menumbuhkan rasa semangat guru untuk mencerdaskan peserta didik.²¹

c. Pengelolaan Keuangan Untuk Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana

Pengelolaan keuangan yang baik sangat penting dalam penyediaan sarana dan prasarana. Perencanaan anggaran yang matang, pemantauan pengeluaran, dan evaluasi kebutuhan serta efisiensi penggunaan dana dapat meningkatkan ketersediaan fasilitas tersebut. Sarana dan prasarana (sarpras) memiliki pengaruh besar terhadap kualitas pendidikan, karena sarana dan prasarana salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas proses pembelajaran. Agar sarana prasarana pendidikan dapat terus berdaya guna aktif dalam proses pembelajaran pihak sekolah harus terus melakukan perkembangan dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman, karena zaman sekarang teknologi semakin berkembang terutama dalam bidang pendidikan.²²

²¹ Lilik Pujianti, "Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan SMA PGRI Sumberejo," *Jurnal Manajemen Pendidikan* (2020): 6.

²² Adriana Hanny Bella Sukma and Alifia Maharani Nasution, "Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemnuhan Sarana Prasarana Pendidikan Di Bekasi," *Manajemen Pendidikan* 4, no. 1 (2022): 52.